



KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI

NOMOR : 6/ KPN.W27-U2/SK.OT1/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti program Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Badan Peradilan Umum melalui Program lanjutan yang berkesinambungan yaitu Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masohi;
- b. bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masohi harus selaras dengan kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan.
- c. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masoh pada Pengadilan Negeri Masohi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

Memperhatikan : Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI TENTANG PEMBENTUKAN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masohi;

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) bertugas untuk menerapkan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masohi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Masohi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua

Bulbul Usman Resa Syukur

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Masohi

Nomor : 6/KPN.W27-U2/SK.OT.1/I/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H	Ketua	Pembina
2.	Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Tim
PENGELOLAAN DOKUMEN			
3.	Dovy Luhukay, S.E.	Sekretaris	Koordinator Pengendali Dokumen
4.	Rahman Tarodji, S.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
5.	Saleh Ambo	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
6.	Frengky Akiaar, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
7.	Hediana Nirahua, S.E., M.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
8.	Juanita I. Gaspersz, S.E.	Kasubag Kepegawaian dan OT	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
9.	Dewi H. Tabaleku, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pengendali Dokumen
PELAKSANAAN SURVEI			
10.	Muhammad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.	Panitera	Koordinator Pelaksanaan Survei
11.	Frengky Akiaar, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pelaksanaan Survei
12.	Kurnia, S.H	Analisis Perkara Peradila	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei
13.	Rio Novianto, S.H	Analisis Perkara Peradila	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei
14.	Yosef F. Laliatu	Jurusita Pengganti	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei
15.	Siti A. Kumkelo	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei
16.	Jantye van Harling	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei
17.	Enny I. Syukur, S.E.	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas PTSP/ Pelaksana Survei

Ketua

Bul Bul Usman Resa Syukur